

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIREBON

**Rakhmat Hardiyansyah<sup>1</sup>, Muhammad Amin<sup>2</sup>**

Politeknik Bina Persada Cirebon, Cirebon, Indonesia<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta, Indonesia<sup>2</sup>

E-Mail: [rakhmat.hardi@gmail.com](mailto:rakhmat.hardi@gmail.com)

### ABSTRACT

*Efforts to implement poverty reduction policies in Cirebon Regency require the active role of various stakeholders to reduce poverty, the purpose of this study is to analyse the process and outcomes of poverty reduction policy implementation in Cirebon regency in order to formulate appropriate poverty reduction policies. Qualitative methods were used to identify the drivers of poverty reduction policy implementation from the perspective of policy makers and the poor in Cirebon regency. Data analysis was carried out using triangulation techniques, namely data reduction, data presentation and inference. The results of the study showed that the process of poverty reduction policy implementation was carried out by the Cirebon District Poverty Reduction Coordination Team. The poor in Cirebon County receive various types of assistance, but the implementation of poverty reduction policies often fails due to insufficient funding, weak supervision and invalid data. They want transparency about aid recipients, as well as training and business capital. This study highlights the importance of communication and the role of bureaucratic structures in achieving transparency in poverty reduction policies.*

**Keywords:** Program implementation; Public policies; Poverty reduction.

### ABSTRAK

*Upaya dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon maka perlu peran aktif dari berbagai para pemangku kepentingan untuk menurunkan angka kemiskinan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hasil implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon untuk memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat. Metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari sudut pandang pembuat kebijakan dan masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa proses dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon. Masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon menerima berbagai bantuan, namun implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sering gagal karena dana tidak memadai, lemahnya pengawasan dan data yang tidak valid. Mereka menginginkan transparansi penerima bantuan serta pelatihan dan modal usaha. Penelitian ini menekankan*

*pentingnya komunikasi dan peran struktur birokrasi dalam mewujudkan transparansi kebijakan penanggulangan kemiskinan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi program; Kebijakan Publik; Penanggulangan Kemiskinan.*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 280,73 juta jiwa (*Badan Pusat Statistik*, 2023). Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang kesejahteraan sosial mewajibkan negara untuk mengurus anak-anak miskin dan terlantar serta menyelenggarakan sistem perlindungan dan keamanan sosial secara nasional. Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat. (Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 107,92 Ha. Kompleksitas persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Banyak

pendapat dan asumsi yang lebih mirip mengatakan bahwa kemiskinan itu dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan (Abas et al., 2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan untuk kesejahteraan sosial kepada masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin (Herijal Putra & M. Anzaikhan, 2022). Dalam menjalankan peran dan tugasnya, pemerintah tentunya tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia: peningkatan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bangsa telah menjadi tujuan bersama negara ini dari dulu hingga saat ini (Baykin & Widinarsih, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang masuk kategori kurang mampu (*Badan Pusat Statistik*, 2023). Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Apabila penyebab kemiskinan merupakan akibat dari Kekurangan dan kelemahan pribadi, serta strategi penyelesaiannya, akan lebih memfokuskan upaya untuk mengubah aspek kemanusiaan sebagai individu atau anggota masyarakat (Wardi & Kusdarini, 2020).

Dalam hal ini, upaya pengembangan masyarakat akan fokus pada peningkatan kualitas manusia sehingga dapat secara efektif mengatasi peningkatan taraf hidup. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya dilakukan semenjak dasawarsa 1970-an (Wardi & Kusdarini, 2020). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan (Nurmasari & Raden Imam Al Hafis, 2020).

Dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berdasarkan (Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)) yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kelompok kepentingan lainnya. Artinya dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama demi kepentingan masyarakat secara sistematis, terencana dan sinergi atau kolaborasi, dari sudut pandang administrasi publik kerjasama berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau dapat dikatakan kerjasama beberapa lintas sektor yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Handayani et al., 2023).

Upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui program pemberdayaan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup mereka dengan mengembangkan potensi dan memperkuat kemampuan mereka untuk berpartisipasi sebagai agen Pembangunan (Bella Yuniar et al., 2024). Dukungan ini terus berlanjut pada tahun anggaran ini, dan dalam prosesnya telah diterapkan sistem yang membuat kemasan non-tunai tidak hanya untuk beras tetapi juga untuk paket sembako yang disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Selain itu, kita juga dapat melihat kemajuannya dalam implementasi. Saat ini, pemerintah juga menawarkan bantuan bersyarat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini mencakup faktor-faktor tertentu dan kriteria khusus untuk menerima bantuan tersebut.

Pemerintah saat ini sedang meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan yang paling penting, memenuhi kebutuhan pangan demi mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu langkah pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di daerah-daerah miskin dan berpendapatan rendah adalah melalui program subsidi pangan, khususnya dalam bentuk beras (Mufatiroh et al., 2021). Jelas bahwa

pertumbuhan ekonomi, yang selama ini menjadi instrumen utama dalam strategi pengentasan kemiskinan, tidaklah mencukupi. Pertumbuhan semata tidak cukup untuk memperbaiki kondisi kehidupan di negara-negara selatan. Selain itu, dari perspektif sosial, pertumbuhan dapat memiliki dampak negatif jika tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang secara tegas bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat (Lestari et al., 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memfokuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya mengenai cara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Mereka memanfaatkan dana dari anggaran pemerintah yang besar untuk melaksanakan hal ini (Hutagalung et al., 2022) Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah telah merancang berbagai program yang dijalankan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah. Di tingkat nasional, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah kepemimpinan Wakil Presiden. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan dan strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dipimpin oleh Wakil Kepala

Daerah. Tim ini bertugas melaksanakan program-program yang telah ditetapkan di tingkat pusat serta mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat miskin di daerah masing-masing. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Alfisyahrin, 2021) Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dirancang dan dilaksanakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Program pengentasan kemiskinan ibarat aturan dan tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai banyak uang. Pemerintah melakukan berbagai hal untuk memastikan orang-orang ini mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti makanan dan bantuan kesehatan. Hal ini membantu seluruh komunitas menjadi lebih kuat dan tidak menghadapi banyak masalah. (Yusrafitri, 2022). Aturan dari pemerintah ini dibuat untuk menyesuaikan dengan jumlah uang yang dimiliki setiap daerah. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga. Papua mempunyai uang khusus yang diberikan kepada penduduk asli untuk membantu mereka tetap aman dari masalah dan menjaga mereka dari kesulitan keuangan (Sari,

2024). Kebijakan sosial berperan penting dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini juga memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk hidup layak, baik secara pribadi maupun bersama komunitas. Selain itu, kebijakan sosial mendorong kerjasama dan berbagi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan bersama (Farikhah et al., 2024).

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2023

| Tahun                   | Persentase Penduduk Miskin (%) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2022                    | 12,01                          | 266,1                              |
| 2023                    | 11,20                          | 249,18                             |
| Perubahan 2022-2023 (%) | -0,81                          | -16,92                             |

Sumber: Profil Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon, 2023

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

| Tahun | Jumlah Kepala Keluarga yang menerima PKH | Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Jumlah                        |        |
|-------|--|---|-------------------------------|--------|
|       |  |   | Jumlah Kepala Keluarga Miskin | Persen |
| 2022  | 96,230 KK                                | 232.813 Orang                                   | 574.232 KK                    | 57,30% |
| 2023  | 91,210 KK                                | 242.352 Orang                                   | 578.321 KK                    | 57,68% |

Sumber: Open Data Kabupaten Cirebon, 2023

Dari data diatas menunjukan bahwa jumlah kepala keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan tahun 2023 meningkat sebesar 0, 38% dari

tahun 2022 dari table diatas dilihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya menangani masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil analisis dari data dan beberapa permasalahan diatas dalam menelaah terkait penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon” untuk menjabarkan secara jelas bagaimana mekanisme penerapan program-program guna menurunkan angka kemiskinan pengelolaan program oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berlangsung di Kabupaten Cirebon.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada subjek tertentu yang dianalisis sebagai sebuah studi kasus. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini memberikan gambaran dan ilustrasi menyeluruh mengenai berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial (Mulyana, 2003) Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini merupakan bentuk komunikasi dua arah, di mana peneliti menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara. Proses wawancara dilakukan secara fleksibel,

tanpa terlalu terikat pada susunan pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman (Rosaliza, 2021). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada Bapak Dr. Hilmy Rivai, M.Pd selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Ibu Dra. Indra Fitriani, M.M. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dan Ibu Astri Diana Ekasari S.Pi., M.TrPi selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin. Wawancara dikembangkan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yang dilakukan secara berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, yang dilakukan melalui tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data melibatkan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi, dan mentransformasi data (Muhammad Elwan et al., 2022). Keabsahan data dijamin melalui berbagai strategi, antara lain triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan, ketekunan dalam pengamatan dengan melakukan observasi berulang dan mendalam, serta

kejelasan audit trail dengan mencatat setiap langkah penelitian secara rinci dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Peneliti menggunakan teori dari Edward III dalam (Fauziah & Arif, 2021) mengenai teori Edward III (Subekti et al., 2017) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

### Komunikasi

Menurut Jones (1991) dalam (Indhawati et al., 2021) Implementasi kebijakan mudah dipahami secara teori dan konsep, namun dalam praktiknya, pelaksanaannya tidak selalu sederhana. Pelaksanaan kebijakan secara nyata sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dalam menganalisis studi implementasi kebijakan publik, penting untuk memahami berbagai variabel atau faktor yang memengaruhinya. Terdapat beberapa model implementasi yang dapat dijadikan acuan, antara lain sebagai berikut:

Grindle (1980) dalam (As'adi David, 2024) Dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat didekati sebagai serangkaian tindakan administratif umum yang perlu dianalisis hingga tingkat program yang lebih spesifik. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat diukur dari kemampuannya menjalankan program sesuai dengan rancangan awal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan



secara keseluruhan perlu dievaluasi dengan mempertanyakan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Akib, 2012).

Kesesuaian ini dapat diukur melalui dua aspek utama, yaitu: a) Dari segi proses, yang mencakup analisis pada tingkat program yang spesifik serta alokasi dana yang diberikan, dan b) Dari segi hasil yang dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut. Dimensi ini dievaluasi berdasarkan dua faktor, yaitu: a) Dampak atau pengaruhnya terhadap masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta sejauh mana kelompok sasaran menerima perubahan tersebut (Tuwu & La Tarifu, 2023).

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan, atau yang dikenal sebagai implementabilitas (implementability). Implementabilitas ini dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks pelaksanaan kebijakan (context of implementation) (Sutmasa, 2021).

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah, seperti di Kabupaten Cirebon, disampaikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Sosial. Kebijakan dan program

yang disusun tercantum dalam rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan Kabupaten Cirebon. Selain itu, pemangku kepentingan lain, seperti Badan Zakat Nasional (Baznas), juga dilibatkan. Namun, terdapat perbedaan dalam laporan dan pembaruan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, yang menyebabkan beberapa program, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya, tidak tepat sasaran. Masyarakat miskin telah dipetakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon untuk menerima bantuan sosial dan program pembangunan yang tepat sasaran. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon juga telah mendata kondisi rumah yang dihuni untuk menentukan kelayakannya, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memeriksa ketersediaan sumber air, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

### **Sumber Daya**

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pembangunan ekonomi yang bertumbuh berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk dan berakhir dengan penurunan kemiskinan (Endrawati et al., 2023).

Komponen yang digunakan oleh Dinas sebagai acuan untuk verifikasi dan validasi terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa, data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta anggaran untuk mendukung program pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan bayi stunting dari Dinas Kesehatan. Dinas Sosial juga telah memberikan bantuan berupa fasilitas pengembangan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin ekstrem dan warga miskin yang tercatat dalam data P3KE. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 249,18 ribu orang atau sekitar 11,20 persen.

Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meningkatkan anggaran untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk pemberian beasiswa, pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan program rumah tidak layak huni sebanyak 10.411 unit pada periode 2019-2024. Untuk tahun 2024, anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) sebanyak 271 unit, bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 120 unit, dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 148 unit. Totalnya, ada 539 unit rumah yang diperbaiki, yang dibiayai melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), Pagu Indikatif Sektor (PIS), dan Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota dewan.

Masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon juga mendapatkan bantuan ekonomi keluarga berupa santunan tunai langsung dan bantuan sembako melalui program Cirebon Sejahtera yang disalurkan oleh Badan Zakat Nasional Kabupaten Cirebon, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sembako beras. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cirebon juga menyediakan fasilitas air minum untuk 96.200 unit rumah tangga.

#### **Disposisi/sikap**

Dalam dimensi ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap pelaksana terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai dimensi ini dapat disimpulkan bahwa Sikap/kecenderungan pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Situasi ini sangat mungkin terjadi karena implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh masyarakat setempat yang sangat sadar akan masalah dan perasaan mereka.



Namun kebijakan yang akan dilaksanakan bersifat “top down” dan pembuat kebijakan mungkin tidak pernah mengetahui atau bahkan menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang ingin ditangani masyarakat (Zakiyyan Dzulqarnain et al., 2022).

Secara umum, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan baik. Namun, Dinas terkait menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, antara lain dana yang terbatas, kurangnya pengawasan dari pihak pimpinan, serta tidak adanya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengakibatkan program-program yang disusun menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, ada juga program yang tidak berjalan sesuai rencana dan faktor dari masyarakat itu sendiri yang masih memiliki pola pikir miskin. Masyarakat miskin merasa belum puas dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan sembako beras. Mereka menginginkan bantuan modal usaha agar bisa memperoleh pendapatan mandiri dan berharap pelatihan keterampilan yang mereka ikuti dapat diikuti dengan perhatian lebih dari dinas terkait agar bermanfaat.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan faktor yang dialami dalam penelitian,

pada realitasnya dapat mendukung terhadap pelaksanaan seluruh tahapan program dan kegiatan dalam kebijakan (Larasati, 2023). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Cirebon melibatkan koordinasi yang intens antar instansi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Dinas Sosial serta kelurahan dan desa terkait. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cirebon secara berkala melakukan koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, desa, RT/RW, LPM, serta tokoh masyarakat dan Dinas Sosial. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon juga berkoordinasi dengan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pihak terkait lainnya, seperti Badan Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan efisien. Proses penerimaan bantuan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dimulai dengan usulan dari kelurahan/desa. Tahap berikutnya adalah pendataan, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu sumber data. Masyarakat miskin juga

mengungkapkan bahwa mereka menginginkan adanya fasilitas transportasi untuk memudahkan penerimaan bantuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan berjalan dengan baik. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan peningkatan kapasitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah berhasil mencapai target dengan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai intervensi yang dilakukan, termasuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, juga menunjukkan efektivitas yang signifikan.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan dipengaruhi sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon sudah baik. Indikasi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon seperti masalah birokrasi, kekurangan dana atau resistensi dari masyarakat. Mengetahui kendala ini penting untuk memperbaiki strategi dan kebijakan di

masa depan. Perlunya peningkatan pendapatan, kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Saran berdasarkan temuan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon yaitu evaluasi, formulasi rekomendasi untuk perbaikan termasuk perbaikan dalam desain program, alokasi anggaran, pelatihan bagi pelaksana program dan peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, R., Abdussamad, Z., & Aneta, Y. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program*. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Alfisyahrin, D. (2021). Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang. *Jurnal Media Administrasi*, 3(1), 89–99.
- As'adi David, M. R. A. R. K. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Berdasarkan

- Perspektif Grindle (Studi di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 010(02), 181–190.
- Badan Pusat Statistik. (2023).
- Baykin, M. D., & Widinarsih, D. (2022). Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Muhammadiyah Di Pulau Lombok Ntb Kajian Literatur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3549>
- Bella Yuniar, Putri Dwi Kartini, Ayuning Budiati, & Juliannes Cadith. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon. *Jurnal Niara*, 16(3), 542–551. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.17126>
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022*.
- Farikhah, K., Salatiga, U., Putri, N. P., Sajiwo, R. G., & Terbuka, U. (2024). Peran Pekerja Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Candirejo Semarang. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 101–114. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.101-114>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Handayani, N., Risianti, R., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3329>
- Herijal Putra, N., & M. Anzaikhan. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi Covid-19. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 39–56. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1757>
- Hutagalung, J., Nofriansyah, D., & Syahdian, M. A. (2022). Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*,

- 6(1), 198.  
<https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3478>
- Indhawati, A., Izzuddin, P. R., Yahya, M. A., & Hardjati, S. (2021). Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 4(2).  
<https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18060>
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.* (n.d.).
- Larasati, N. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang.*
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1739–1752.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sumput Kecamatan Driyorejo* (Vol. 8, Issue 2).
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). Implementasi Program Penanggulangan Pravelansi Stunting Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho*, 5(2), 289–303.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya).*
- Nurmasari, & Raden Imam Al Hafis. (2020). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(02), 1180–1192. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter--569-20200728203245.pdf>
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon.* (n.d.).
- Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).* (n.d.).
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Provinsi Jawa Barat.* (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.* (n.d.).  
[www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id)
- Profil Kemiskinan di Kabupaten Cirebon 2023.* (n.d.).
- Rosaliza, M. (2021). Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi

- Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79.  
<https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Sari, M. (2024). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Kapasitas*.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.  
<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.  
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Tuwu, D., & La Tarifu. (2023). Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. *Journal Publicuho*, 6(1), 20–29.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.72>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. (1945).
- Wardi, S. N., & Kusdarini, E. (2020). Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Sebagai Wujud Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul. *AGORA: Scientifics Journal of Pancasila and Civic Education*, 9, 347–357. AGORA: Scientifics Journal of Pancasila and Civic Education
- Yusrafitri, S. R. (2022). *Sinergitas Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19*. 7(2).
- Zakiyyan Dzulqarnain, G., Meigawati, D., & Fajar Basori, Y. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. In *Jurnal Professional* (Vol. 9, Issue 1).